



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN – DPR RI
DALAM RANGKA BKSAP SDG'S DAY
KE PEMERINTAH PROVINSI BANDA ACEH, ACEH**

28 – 30 Maret 2022

I. PENDAHULUAN

BKSAP SDGs *Day* adalah program untuk mensosialisasikan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI yang berfungsi sebagai *focal point* diplomasi DPR (Parlemen). Sosialisasi tersebut diperlukan karena diplomasi parlemen yang dijalankan BKSAP tidak banyak diketahui publik. Padahal, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti termaktub dalam Pasal 69 (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Fungsi tersebut dijabarkan dalam Pasal 4 (2) dan Pasal 219 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menegaskan tentang Peran Diplomasi DPR untuk berkontribusi memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan dan global.

Didasarkan atas fakta kurang dikenalnya diplomasi parlemen oleh BKSAP DPR RI dan karena potensi pemanfaatan diplomasi tersebut untuk memajukan pemerintah daerah, BKSAP kembali menggelar BKSAP *Day* berkolaborasi dengan Pemprov Aceh dengan mengusung tema “**Peran Parlemen dalam Mendukung Diplomasi Soft Power Melalui Dunia Pendidikan**”.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pemprov dan *stakeholder* pemerintahan Aceh yaitu: Asisten Sekretaris Daerah III, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan OTDA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, KA. Kesbangpol, Staf Ahli Gubernur Bid. Keis. SDM dan Hubungan Kerja sama, Kepala Perwakilan Kejaksaan Tinggi, Perwakilan Kapolda, Perwakilan Pangdam Iskandar Muda, Perwakilan Ketua DPRA, Civitas Akademika, Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala -Banda Aceh, Civitas Akademika UIN Ar-Raniry, Civitas Akademika Univ. Iskandar Muda-Banda Aceh.

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Pelaksanaan kunjungan kerja diplomasi parlemen BKSAP DPR RI ke Provinsi Aceh pada tanggal 28 – 30 Maret 2022, didasarkan pada Surat Tugas DPR RI Nomor : 13/D/ST-PD.DN/BKSAP-KSB/3/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Surat Tugas DPR RI Nomor : 13 A/D/ST-PD.DN/BKSAP-KSB/3/2022 tanggal 7 Maret 2022 .

B. DELEGASI

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng (A-422)	Wakil Ketua BKSAP/(F-PKS) – Komisi II
2	Ir. H. A. Hafisz Tohir (A-487)	Wakil Ketua BKSAP/(F-PAN) – Komisi XI
3	Muslim, S.HI., M.M. (A-523)	Anggota BKSAP/(F-PD) – Komisi VI
4	Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc. M.A. (A-449)	Anggota BKSAP (F-PKS) – Komisi I

C. VISI DELEGASI

- Mensosialisasikan BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beserta fungsinya dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia melalui fungsi diplomasi parlemen.
- Mensosialisasikan diplomasi parlemen, perkembangan, dan pencapaiannya yang dilakukan BKSAP dalam kerangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, khususnya yang terkait dengan upaya-upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs yaitu Tujuan Pendidikan Berkualitas.

D. MISI DELEGASI

- Membangun sinergi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah dalam mendukung pengembangan konsep diplomasi multi-pihak.
- Mendorong peningkatan partisipasi berbagai kalangan dalam memahami kepentingan Indonesia di dunia internasional.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi Wakil Ketua BKSAP DPR RI diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSB BKSAP berupa paparan mengenai pentingnya mensosialisasikan diplomasi DPR RI dan Civitas Akademika beberapa universitas di Provinsi Aceh serta membangun sinergi dan kolaborasi untuk mendukung pengembangan potensi daerah dalam konteks kawasan dan global. Sekretariat KSB juga melakukan komunikasi yang intensif dengan jajaran Pemprov Aceh agar acara BKSAP SDGs Day dapat berjalan lancar.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA

PUKUL	ACARA	KETERANGAN
Selasa, 29 Maret 2022		
07.00	Sarapan pagi	Resto Hotel
07.30	Menuju Kantor Gubernur Provinsi Aceh	
08.00	Sekretariat KSB BKSAP tiba di Kantor Gubernur (persiapan acara)	
11.20	Anggota delegasi BKSAP DPR RI tiba di kantor Gubernur (menunggu di holding room Kantor Gubernur)	Kantor Gubernur Provinsi Aceh
11.30 – 13.30	Pertemuan dengan: <ul style="list-style-type: none">- Gubernur Aceh beserta jajarannya;- Rektor, Dekan, dan Mahasiswa/i Universitas Syiah Kuala- Rektor, Dekan, dan Mahasiswa/i Universitas Teuku Umar- Rektor, Dekan, dan Mahasiswa/i Universitas Iskandar Muda- Rektor, Dekan dan Mahasiswa/I Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Acara : <ol style="list-style-type: none">1. Sambutan dari Perwakilan Gubernur Aceh2. Sambutan dari Rektor3. Paparan dari Ketua Delegasi4. Tanya Jawab	
13.30	Acara Selesai	

Pelaksanaan kegiatan BKSAP SDGs Day diselenggarakan di Kantor Pemrov Aceh, Banda Aceh, Aceh, pada tanggal 29 Maret 2022. Kegiatan menggunakan metode

tatap muka langsung yang dihadiri oleh: Delegasi BKSAP DPR RI dan unsur Pemprov dan *stakeholder* pemerintahan Aceh yaitu: Asisten Sekretaris Daerah III, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan OTDA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, KA. Kesbangpol, Staf Ahli Gubernur Bid. Keis. SDM dan Hubungan Kerja sama, Kepala Perwakilan Kejaksaan Tinggi, Perwakilan Kapolda, Perwakilan Pangdam Iskandar Muda, Perwakilan Ketua DPRA, Civitas Akademika, Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala -Banda Aceh, Civitas Akademika UIN Ar-Raniry, Civitas Akademika Univ. Iskandar Muda-Banda Aceh.

Agenda pertemuan terdiri dari paparan Wakil Ketua BKSAP yang meliputi dua tema pokok yaitu pengenalan diplomasi parlemen serta tupoksi BKSAP dan diplomasi soft power melalui pendidikan dan pertukaran budaya. Paparan kemudian diikuti dengan dialog dan tanya jawab.

B. JALANNYA KEGIATAN

1. Pembukaan

Acara diawali oleh sambutan dari pihak Pemprov Aceh yang diwakili oleh Asisten Sekda III yaitu Dr. Iskandar AP, S.Sos., M.Si. yang menyampaikan ihwal urgensi pencapaian SDGs yang harus ditangani semua pihak. Disampaikan pula bahwa BKSAP memiliki peran sangat penting dalam pencapaian SDGs lantaran BKSAP memiliki jaringan dengan parlemen-parlemen dunia. Ia kemudian menyampaikan harapan agar agenda BKSAP Day dapat memperkuat program pendidikan di Aceh.



Sambutan Pemprov Aceh yang diwakili oleh Asisten Sekda III Dr. Iskandar AP, S.Sos., M.Si.

2. Paparan

Selanjutnya paparan yang disampaikan oleh Ketua Delegasi Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. Mengawali paparannya Wakil Ketua BKSAP menjelaskan BKSAP dan Tupoksinya. Selanjutnya ditekankan beberapa isu penting dewasa ini yaitu IT, kesehatan, dan pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus melalui tatap muka langsung.

Pada sisi lain Wakil Ketua BKSAP mengutarakan bahwa pendidikan merupakan senjata paling ampuh saat ini dimana dengannya dapat menghasilkan teknologi sangat maju dan dapat memprediksi hal-hal yang akan terjadi. Wakil Ketua BKSAP, Dr. H. Mardani Ali Sera meminta adanya kolaborasi kerja bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di Aceh. Hal ini dalam rangka memenuhi rencana aksi global yang telah disepakati Indonesia bersama pemimpin dunia lainnya melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target, di mana salah satunya adalah Pendidikan Bermutu.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera

Dr. H. Mardani Ali Sera mengapresiasi semangat mereka untuk membangun Aceh melalui pendidikan sangat kuat dan harus jadikan ini kerja bersama mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Karena itu, kita di pertemuan di sini undang akademisi juga, ada LSM juga sehingga semuanya bekerja keras,

Wakil Ketua BKSAP juga menyinggung beberapa isu penting yang menjadi perhatian BKSAP yaitu konflik Rusia-Ukraina, SDGs, perubahan iklim, demokrasi, perdamaian, dan pentingnya *global ethic* sebagai rujukan moral sains, secara singkat dipaparkan terkait SDGs dengan menekankan Goal 4 yaitu pendidikan bermutu.

Terkait penurunan kualitas pendidikan di Aceh, khususnya saat pandemi, Dr. H. Mardani Ali Sera menilai kondisi tersebut terjadi pula di banyak tempat. Terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Karena itu, diakuinya hal ini menjadi tugas besar DPR RI bersama pemerintah untuk benar-benar mengawal setiap program pembangunan di Aceh agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Jika anggaran yang disalurkan pemerintah ke Aceh tepat guna, maka ia yakin akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh.

“Anggaran itu harus betul-betul diterima oleh masyarakat. Karena tanpa ada perbaikan sistem anggaran evaluasi terhadap program-program pembangunan, uangnya terus keluar tapi indeks pembangunan kita, kualitas pendidikan kita, kualitas infrastruktur kita tidak bertambah baik. Nah ini catatan besar. Walaupun buat kami ada kemajuan, tapi lambat kemajuannya

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh yang hanya naik 0,19 poin dari angka 71,99 poin pada tahun 2020 menjadi 72,18 pada tahun 2021. Namun, capaian tersebut masih lebih baik ketimbang tahun sebelumnya yang hanya meningkat 0,09 poin. Adapun angka IPM 2022 yang menjadi komparasi antara 2021-2022 selama pandemi belum dirilis secara resmi oleh BPS.

Dr. H. Mardani Ali Sera berharap agar sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh, dapat lebih diperbaiki. Sebab, menurut informasi yang diterimanya, saat penerimaan CPNS, banyak menerima masyarakat dari luar Aceh. “Namun, saat sudah diterima sebagian mereka jadi PNS, 1-2 tahun keluar. Jadi akhirnya kekurangan tenaga di Aceh itu sendiri. Itu jadi catatan besar buat kami,” tutup Anggota Komisi II DPR RI ini.



3. Sesi diskusi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir yang juga bertindak sebagai moderator menyampaikan bahwa kiprah diplomasi Indonesia saat ini dinilai masih kurang dibandingkan di era Presiden Soeharto dan Presiden SBY, (menyebutkan peran Indonesia di konflik Yugoslavia).



Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ir. H. A. Hafisz Tohir

Achmad Hafisz Tohir juga menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) belum menunjukkan signifikansi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Di sisi lain, Indonesia bersama pemimpin dunia lainnya, telah menyepakati rencana aksi global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) berisi 17 tujuan dari 169 target yang diharapkan tercapai pada 2030 mendatang.

Diantara target SDG's tersebut adalah menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, dan mengurangi ketimpangan. "Sehingga, saya kira perlu suatu kajian yang lebih mendalam supaya Aceh ini bisa diberikan perhatian sebagaimana mestinya. Artinya dari sisi pendidikan, kesehatan, dari sisi lain apakah kita hanya cukup sampai di (istilah) Otsus itu saja. Karena efektivitas (dana Otsus) itu sejauh ini tidak menggambarkan yang cukup signifikan,"

Adapun informasi dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pemanfaatan Dana Otsus Provinsi Aceh sejauh ini ditunjukkan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Adapun jumlah Dana Otsus Aceh untuk Tahun Anggaran 2022 telah disepakati sebesar Rp7,5 triliun, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, jika dana otsus Aceh tersebut optimal untuk pembangunan infrastruktur, maka sekaligus akan dapat menekan angka kriminalitas remaja yang disebabkan karena kecanduan game online. Pendekatan infrastruktur ini juga akan berdampak signifikan pula bagi keterbukaan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, karena dari infrastruktur tersebut hasil bumi bisa diangkut. Dengan infrastruktur tersebut kegiatan lebih cepat, juga ketimpangan yang terjadi di daerah akan bisa teratasi, sehingga angka kriminalitas bisa terkontrol.

Sementara **Wakil Rektor Universitas Teuku Umar** mengkritisi data kemiskinan di Aceh yang menurutnya dimanipulasi demi mendapatkan kucuran dana. Ia menyoal ihwal Aceh sebagai wilayah termiskin di Indonesia. Lantas ia memberikan ilustrasi bahwa Aceh tidaklah semiskin yang disebutkan data nasional. Sebagai contoh bahwa untuk dana perayaan Maulid di 6497 kampung di Aceh bisa menelan biaya sekitar 1,6 triliun. Terkait data tersebut, ditegaskan perlu pelibatan kampus dalam penentuan data kemiskinan di Aceh.



Pada sisi lain, Universitas Teuku Umar berminat mengirim mahasiswa/mahasiswinya untuk melakukan magang di BKSAP DPR, dimana program magang di Universitas Teuku Umar diagendakan selama satu tahun.



Pihak **Universitas Iskandar Muda** pada sesi diskusi juga mempersoalkan kevalidan data kemiskinan di Aceh. Lantas ditanyakan pula sejauh manakah capaian SDGs Indonesia selama tujuh tahun. Selanjutnya disinggung kekerasan

terhadap perempuan di Aceh dimana pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Disampaikan pula keprihatinan kecanduan mahasiswa terhadap game online.



Pihak **Universitas Syiah Kuala** mengkritisi perbedaan pengelolaan pendidikan di Indonesia dimana untuk SD diserahkan ke kabupaten atau kota, SMA ke pemerintahan provinsi dan universitas ke pusat. Perbedaan tersebut memicu masalah dalam hal penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai.

4. Tanggapan

Menanggapi ragam pandangan berbagai civitas kampus, **Wakil Ketua BKSAP, Dr. H. Mardani Ali Sera** menjelaskan bahwa magang di BKSAP DPR sudah tercatat di Dikti dalam rangka Kampus Merdeka dan dilakukan selama enam bulan. Adapun untuk yang magang satu tahun, lanjutnya, bisa melanjutkan magang di Komisi-Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lain di DPR.

Terkait SDGs, Wakil Ketua BKSAP menjelaskan SDGs merupakan agenda yang berasal dari akan rumput dan ini berbeda dengan MDGs., dan capaian SDGs Indonesia, dijelaskan saat ini DPR terus memantau pelaksanaan SDGs pemerintah.

Terkait pendidikan, disampaikan gagasan bahwa pendidikan harus dikontrol oleh pemerintah pusat untuk menghindari politisasi pendidikan di level lokal. Sementara terkait data kemiskinan, pembuatan data kemiskinan harus desentralisasi. Lalu ia memberikan contoh bagaimana di Amerika Serikat tidak ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional tapi yang ada KTP/identitas lokal.



Terkait dampak *game online*, Wakil Ketua BKSAP memandang bahwa semua pihak harus ikut terlibat untuk memastikan bahwa *game online* tidak merusak generasi muda.

Anggota BKSAP DPR RI, **Muslim, S.HI., MM.**, menyatakan akan mendukung penuh program magang mahasiswa Aceh di BKSAP DPR RI. Di sisi lain ia menjelaskan bahwa kasus kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng merupakan bentuk ketidakberdayaan pemerintah terhadap mafia. Terkait hal itu, diperlukan komitmen kuat penegakkan hukum yang tegas. Lantas ia mengkritisi mahasiwa saat ini yang tidak lagi kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat.



Pada kesempatan diskusi tersebut juga disepakati untuk mendorong pemerintah pusat agar mengangkat putra daerah Aceh sebagai ASN/PNS di Aceh terutama lulusan dari kampus-kampus di Aceh

Wakil Ketua BKSAP, Ir. H. Hafisz Tohir menanggapi ihwal data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya data tersebut masih sumir lantaran BPS sendiri tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pendataan secara akurat. Ia menjelaskan bagaimana data BPS Amerika Serikat sangat kurat karena ditopang pendanaan yang sangat memadai. Hal lain, BPS di AS diangkat langsung oleh DPR, bukan oleh presiden. Dampak dari data yang tidak valid, lanjut dia, adalah dapat memengaruhi investor.

Wakil Ketua BKSAP juga menyoroti kelemahan Indonesia yang belum memiliki *single identity*. Diakui Hafisz Tohir bahwa Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai negara maju. Namun hal tersebut berdampak pada hutang Indonesia yang tidak lagi mendapatkan beberapa keringanan.

Hal lain lagi, saat ini pembangunan jika ingin mendapatkan pendanaan secara internasional harus berbasis *green economy*. Masih terkait pembangunan, harus ada cetak biru jangka panjang seperti GBHN di zaman dahulu untuk menjamin keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan nasional.





III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- Kegiatan sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP SDS'S Day dengan tema **Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya** yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 Maret 2022 di Banda Aceh, Aceh, ini berlangsung lancar dan sangat positif. Interaksi antara Civitas Akademika yang hadir dengan Anggota Delegasi sangat dinamis dan secara substantif pesan-pesan utama terkait pentingnya diplomasi parlemen telah tersampaikan dan diterima dengan cukup baik.



- Delegasi BKSAP DPR RI sangat mengapresiasi keterlibatan aktif para peserta BKSAP SDG'S Day dan tentu akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan pada saat pertemuan.



- Melalui acara BKSAP SDGs Day, BKSAP DPR RI dapat mensosialisasikan fungsi dan mandat yang diembannya terkait diplomasi parlemen pada berbagai pihak terutama kalangan Perangkat Daerah Provinsi Aceh, civitas akademika, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Aceh.

B.SARAN

- Melihat antusiasme dan sambutan dari Civitas Akademika di Aceh dalam pelaksanaan acara ini, BKSAP diharapkan terus melakukan sosialisasi diplomasi parlemen ke universitas-universitas lainnya.
- BKSAP SDG'S Day dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan profil BKSAP dan menyebarluaskan peran aktif BKSAP dalam menjalankan diplomasi parlemen.
- BKSAP dapat melakukan inovasi dalam format BKSAP SDG'S Day. Kedepannya diharapkan pelibatan berbagai aktor diplomasi lainnya dalam konteks diplomasi total.

- BKSAP SDG'S Day agar terus mengangkat tema-tema spesifik selain pendidikan dan *up to date* seperti diplomasi ekonomi, diplomasi untuk mendukung SDGs, perjuangan palestina, hak asasi manusia dan pengungsi Rohingya.

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 4 (empat) orang Anggota DPR RI, 2 (dua) orang Pejabat dan 4 (empat) orang Staf Bagian Kerja Sama Bilateral Sekretariat Jenderal DPR RI, 2 (dua) orang wartawan pemberitaan Parlemen dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli BKSAP adalah sebesar Rp. 147.886.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- Bahan paparan
- Dokumentasi
- Beberapa link Liputan Media Online dan Media Sosial:
 - <https://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743104880/dana-otsus-belum-berhasil-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat-aceh>
 - <https://humas.acehprov.go.id/sukses-sosialisasi-bksap-sdgs-di-aceh-setjen-dpr-ri-beri-apresiasi/>
 - <https://kabartamiang.com/news/sukses-sosialisasi-bksap-sdgs-di-aceh-setjen-dpr-ri-beri-apresiasi/index.html>
 - <https://www.instagram.com/p/CbtIVHDPHlq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>
 - <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38383/t/Perlu+Ada+Afirmasi+Kebijakan+Rekrutmen+Pegawai+Pemerintah+untuk+Masyarakat+Aceh>
 - <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38377/t/DPR+Pastikan+Tindak+Lanjuti+Gugus+Tugas+Perdamaian+Rusia+vs+Ukraina+Pasca+IPU+Bali>
 - <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38364/t/Penuhi+Tujuan+SDG%E2%80%99s%2C+BKSAP+Dorong+Kolaborasi+Demi+Perbaikan+Kualitas+Pendidikan+di+Aceh>

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan pelaksanaan BKSAP Day pada tanggal 28-30 Maret 2022 di Kantor Pemrov Aceh, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dokumen terkait akan dijadikan lampiran. Atas nama delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada delegasi untuk melaksanakan tugas berat yang mulia demi bangsa dan negara Indonesia.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 30 Maret 2022
Ketua Delegasi,



Dr. Mardani Ali Sera

A-422

LAMPIRAN

▪ Bahan paparan

Parlemen Indonesia

BKSAP SDG'S DAY
"Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya"

Provinsi Aceh, 29 Maret 2022

#bksapdpr
#BKSAP DPR RI
@bksapdpr1

Delegasi

DR. JAZULI JUWAINI
ANGGOTA BAKDIP DPR RI
FRASERONG

DR. MARDANI ALI SERA
DIREKTOR KEMENTERIAN
FRASERONG

IR. A. HAFISZ TOHIB
WAKIL KETUA BAKDIP DPR RI
FRASERONG

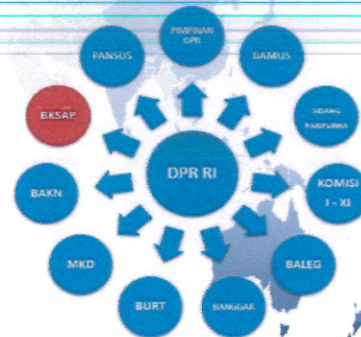
MUSLIM M.M.
ANGGOTA BAKDIP DPR RI
FRASERONG



Apa itu BKSAP?

Badan Kerja Sama AntarParlemen (BKSAP), sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berperan sebagai penjuror (*focal point*) atau ujung tombak (*spearhead*) diplomasi parlemen (DPR).

BKSAP SEBAGAI SALAH SATU ALAT KELENGKAPAN DPR RI



Ragam Inisiatif BKSAP

- ✓ **Panitia Kerja (Panja) MDGs**
 - ✓ Panja SDGs
 - ✓ Panja Pasifik
- ✓ **Panja Indo Pasifik**
 - ✓ WPFSD
 - ✓ IPPP
 - ✓ White Paper
 - ✓ IPPP
- ✓ **First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs**
 - ✓ ...

PELAKSANAAN DIPLOMASI PARLEMEN



KERJA SAMA INTERNASIONAL



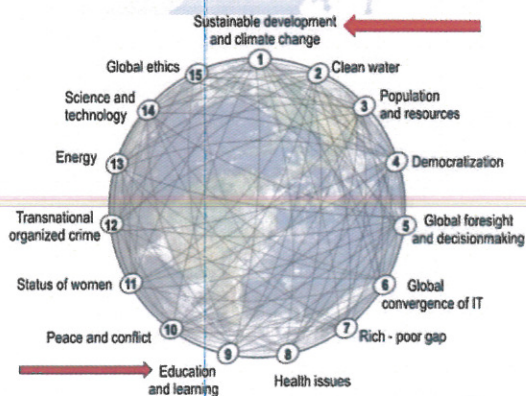
KERJA SAMA REGIONAL



KERJA SAMA BILATERAL



BKSAP dan Isu-isu Global



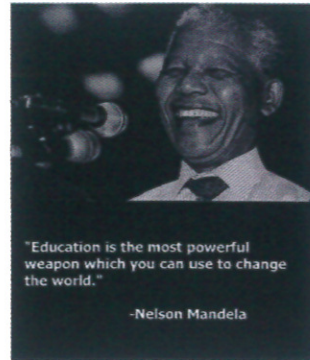
What are the Sustainable Development Goals?

The sustainable development goals are a 'to do list for the planet that will transform the world'.

– Ban Ki-Moon, Secretary-General of the United Nations



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD



4 PENDIDIKAN DAN KETERANGAN

TARGET 4-1	TARGET 4-2	TARGET 4-3	TARGET 4-4	TARGET 4-5
FREE PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION	EQUAL ACCESS TO QUALITY PRIMARY EDUCATION	EQUAL ACCESS TO AFFORDABLE TECHNICAL, VOCATIONAL, AND HIGHER EDUCATION	INCREASE THE NUMBER OF PEOPLE WITH RELEVANT SKILLS FOR FINANCIAL SUCCESS	ELIMINATE ALL DISCRIMINATION IN EDUCATION
TARGET 4-6	TARGET 4-7	TARGET 4-A	TARGET 4-B	TARGET 4-C
UNIVERSAL LITERACY AND NUMERACY	EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND GLOBAL CITIZENSHIP	BUILD AND UPGRADE INCLUSIVE AND SAFE SCHOOLS	EXPAND HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIPS FOR DEVELOPING COUNTRIES	INCREASE THE SUPPLY OF QUALIFIED TEACHERS IN DEVELOPING COUNTRIES

TANTANGAN PENDIDIKAN DAN PERSAINGAN GLOBAL

01 Amanah NAWACITA dan SDGs 2030

- Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- Membahayakan rekam karakter bangsa.
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- Memperkuat kohesi sosial dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

SDGs Goal 4: "Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua"

02 Pemenuhan 58 Juta Tenaga Kerja Terampil Sampai 2030

Diperlukan tambahan 58 juta *skilled workers* untuk menjadikan ekonomi Indonesia peringkat 7 dunia pada 2030.

Sumber: *Ammanya Ekonomi*, *Indonesia* Indonesia, *Indonesia* Global Outlook, 2012.

03 Memenangkan Persaingan SDM di Regional & Global

ASEAN Economic Community:

- 14 juta lapangan kerja terbuka sampai 2025.
- 20 kompetensi keahlian: Pariwisata, Manufaktur/mekatronika/elektro, Pertanian/perikanan/perkebunan, Konstruksi, Bisnis dan perdagangan, Industri kreatif, Food and beverage, Otomotif, Welding, Kimia industri, Akutansi, Kejuruteraan, *Building/complex engineering, Entertainment, Sound and lighting engineering, Desain/teknologi* IT, Kesehatan, *caregiver/baby sitter* pra-*an*h/Surveyor, Massage & spa

GLOBAL:

- 22% pertumbuhan penduduk usia kerja di Eropa dari 2000 ke 2050 akibat aging society.

- *Peluang* bagi SDM Indonesia.

Kondisi Obyektif SDM Indonesia

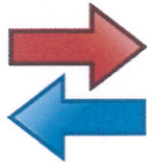


Peringkat 107 dari 189 negara.
Source: [Human Development Report Office 2020](https://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking).
(<https://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking>)

Sinergi Diplomasi Parlemen-Pendidikan untuk Tingkatkan SDM Indonesia



Ragam Peluang dan Tantangan Regional dan Global



Kerjasama



Sinergi dan Kolaborasi DPR dan Kampus

PROPOSAL KERJA SAMA DIPLOMASI BKSAP DAN KAMPUS

- ❖ Kajian konsep diplomasi DPR-Kampus
- ❖ Kajian DPR-Kampus terkait ragam isu global
- ❖ Pendidikan magang di BKSAP-DPR
- ❖ Pendidikan magang di forum-forum regional dan global parlemen
- ❖ Kampus merdeka DPR RI
- ❖ Delegasi bersama BKSAP-Kampus ke ragam negara dalam kerangka: sister campus, pertukaran mahasiswa/dosen, kerja sama riset dan penelitian

- Dokumentasi



















